ANALISIS KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTAPEKANBARU

(STUDI KASUS : PEMBINAAN ANAK JALANAN)

Oleh :

Rian Hidayatullah

Email : rianhidayatullah12@gmail.com

Pembimbing : Hery Suryadi, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Simp. Baru Panam, Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-663277

Abstract

Pekanbaru is the capital of Riau province who also have serious concerns about the derelict in this regard are street children. Figures existence of street children in the city of Pekanbaru is high enough to be one of the social problems in the community. Pekanbaru city government was not without effort to eradicate street children in the city of Pekanbaru. One way to conduct training to street children, it is the primary goal of the research conducted by the author.

In this paper the authors study using qualitative analysis methods. While the data analysis technique used is descriptive analysis of spoken words and observable behavior of the people studied.

Based on the results of research conducted and followed by analyzing the data obtained from the question and answer directly to the informant, resulting in that the views of the five substances of government functions: (1) Provision of Services, as a concept has been well formulated but they lack the facilities that support, because only 1 has a facility to conduct training. (2) setting, Pekanbaru City does not have specific regional regulation of street children, street children is only one study in Pekanbaru City Regulation No. 12 Year 2008 on the Social Order. (3) Coordination of the review has been going pretty well, it is seen from the joint raid Social Service and Pekanbaru City Cemetery with other institutions that together took to the streets. (4) Representatives, Parliament representatives of the people, has synergy with the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery, special support from relevant Council special budget for development of street children. (5) Development, Social Services and Funeral Pekanbaru, only have one container that LBK, the last condition is far from manicured, and until the end of this research in the LBK has been no activity on social issues.

Judging from the five substances, some shortcomings do Social Service and Funeral Pekanbaru City street children in foster such development activities, the construction of additional homes built, as well as the need for understanding and support of all components of both the public and the government to resolve at least reduce the problem of street children.

Keywords: Performance of Social Service, Government Functions, Street Child Development.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan anak jalanan semakin marak semenjak krisis moneter berlangsung pada tahun 1997, ditambah dengan terungkapnya kasus KKN. Hal ini berdampak pada tingginya nilai jual kebutuhan pokok, banyak orang di PHK, masalah pengangguran tak terhelakan, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Semuanya berakibat buruk terhadap anak. Banyak anak yang terlantar, bekerja, eksploitasi anak dibidang ekonomi, pelecehan seksual dan masih banyak perlakuan salah lainnya yang menimpa anak-anak. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Mereka juga berhak atas pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun.

Perkembangan lajunya pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru, memicu situasi dan kondisi berbagai krisis yang berkembang pada saat ini mengakibatkan terjadinya persoalan sosial, salah satunya krisis ekonomi yang membuat kemiskinan menjadi meningkat. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan meningkatnya jumlah anak jalanan yang hidup mencari nafkah yang berada di jalanan terutama di daerah perkotaan. Penyebab dari anak-anak di jalanan ditentukan banyak faktor.

Terlihat di Kota Pekanbaru pada tahun 2011 lalu jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin berjumlah 13.115, jumlah ini sangat jauh dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin di Kota Pekanbaru yaitu 12.554. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin masih bertambah menjadi 3.604, sehingga pada tahun 2012 jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin berjumlah 16.158. Untuk jelasnya pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel I. 1 : Jumlah Penduduk/Rumah Tangga Miskin dan Berumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2012

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Berumah Tidak Layak Huni
1	Tampan	179.470	667	131
2	Payung Sekaki	90.991	968	117
3	Bukit Raya	97.094	1.207	265
4	Marpoyan Damai	130.244	1.544	137
5	Tenayan Raya	130.236	3.061	375
6	Lima Puluh	41.971	1.098	160
7	Sail	21.796	487	127
8	Pekanbaru Kota	25.764	847	146
9	Sukajadi	47.791	1.568	141
10	Senapelan	37.004	1.103	96
11	Rumbai	67.915	1.956	257
12	Rumbai Pesisir	67.663	1.652	168
Jumlah		937.939	16.158	2.120

Dari Tabel I.1 dapat diketahui bahwasanya jumlah RTM miskin terbanyak, yaitu di Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah 3.061 RTM, dan 375 rumah yang tidak layak di huni.

Dampak krisis ekonomi yang semakin menghimpit kehidupan rakyat,

terutama rakyat menengah kebawah menyeret bangsa ini kedalam kehidupan yang menyedihkan. Ini semakin terlihat dengan berbagai kenyataan, bahwa dimana-mana terlihat menurunnya kualitas kehidupan. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup minimal. Semakin banyaknya anak-anak jalanan yang berkeliaran dan bekerja

dijalan terutama di kota-kota, termasuk Kota Pekanbaru.

Fenomena yang terlihat di Kota Pekanbaru saat ini masih sangat tingginya anak jalanan yang bekerja, seperti terlihat di lampu lalu lintas jalan utama. Anak-anak menaruh harapan pundi-pundi rupiah dengan menjual koran, menjual mainan dan aksesoris mobil, membersihkan mobil pengendara pada saat lampu merah lalu

lintas sedang menyala. Hal ini mereka lakukan bukan saja pada jam pulang sekolah, namun di pagi, siang, sore malam, dan hingga dini hari pun masih terlihat adanya anak-anak berjualan koran di lampu merah yang usianya masih sekitar dibawah 15 tahun. Berikut akan dipaparkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial :

Tabel I. 2 : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2013

No.	Jenis PMKS	Satuan	LK	PR	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	14	13	27
2	Anak Terlantar	Jiwa	2750	2890	5640
3	Anak Nakal	Jiwa	580	70	650
4	Keluarga Rentan Ekonomi	KK	240	110	350
5	Anak Jalanan	Jiwa	380	142	522
6	Korban tindak kekerasan	Jiwa	188		188
7	Gepeng	Jiwa	54	97	151
8	Korban penyalahgunaan Napza	Jiwa	95	25	120
9	Keluarga fakir miskin	KK			17.555
10	Rumah tidak layak huni	KK			1.600
11	Korban Bencana Alam	Jiwa			17.800
12	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa			257

Sumber Data : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2013

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa penyandang masalah kesejahteraan di tahun 2013 dikelompokkan empat jumlah terbesar. Dengan jumlah total masalah kesejahteraan anak jalanan yaitu 522 jiwa, Laki-laki 380 jiwa dan Perempuan 142 Jiwa.

Dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Dari pengamatan penulis yang tampak di lampu lalu lintas arengka pasar pagi Panam, jalan Gajah Mada, persimpangan Mall SKA dan banyak di jalan besar utama lainnya. Dampak secara umum terlihat bahwa anak-anak jalanan yang bekerja tersebut kehilangan hak asasi, yaitu mengembangkan identitas diri, serta mengorbankan waktu bermain dan

menerima pendidikan yang semestinya diperoleh pada usia mereka.

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah mengakibatkan meningkatnya jumlah anak yang mencari nafkah yang berada dijalanan. Dari hasil pendataan di enam titik terdapat 128 anak jalanan. Ke enam titik yang di data KPAID tersebut adalah di Simpang Mall SKA (Kecamatan Tampan), Simpang Gramedia (Kecamatan Pekanbaru Kota), Simpang Jalan Harapan Raya-Sudirman (Kecamatan Bukit Raya), Simpang Pasar Pagi Arengka (Kecamatan Marpoyan Damai), Ramayana di sekitar Pasar Kodim (Kecamatan Pekanbaru Kota), dan Simpang Jalan Riau-Jalan Yos Sudarso (Kecamatan Senapelan) (**ykai.net**). Berikut data anak yang bekerja di jalanan berdasarkan umur :

Tabel I. 3 : Data Anak yang Bekerja di Jalanan Berdasarkan Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2010

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	0-6	4	6%
2	7-12	45	33%
3	13-18	77	61%
N		128	100%

Sumber Data : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2010

Dari tabel I.2, menunjukan bahwa jumlah terbanyak anak yang bekerja di jalanan yaitu pada umur 13-18 tahun sebanyak 77 orang anak dengan persentase 61% (persen). Dan jumlah anak yang bekerja di jalanan yang paling sedikit yaitu

pada umur 0-6 tahun 4 orang anak dengan persentase 6% (persen).

Untuk mengetahui jumlah anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2010 hingga 2012 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel I. 4 : Jumlah Anak Jalanan Kota Pekanbaru menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2012

No.	Tahun	Pendidikan			Non Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		SD	SLTP	SLTA		LK	PR	
1	2010	23	75	32	92	171	51	222
2	2011	33	81	43	93	199	51	250
3	2012	44	94	47	98	213	67	283

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dari tabel I.3 diketahui pada tahun 2010 terdapat 222 orang anak jalanan yang terdiri dari 171 orang anak Laki-laki dan 51 orang anak Perempuan yang tergolong dari pendidikan dan juga non pendidikan. Dan pada tahun 2011 jumlahnya bertambah 28 orang anak menjadi 250 orang anak dari jenis kelamin Laki-laki 199 orang anak, dan Perempuan 51 orang anak. Sedangkan pada tahun 2012 bertambah naik menjadi 283 orang anak, Laki-laki 213 orang anak, Perempuan 67 orang anak.

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelayanan dan pemberdayaan sosial, seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia, yang dibantu dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lainnya, dan memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, penyelenggaraan urusan sosial meliputi pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial,

penyelenggaraan urusan sosial, pembinaan pelayanan dan pemberdayaan sosial serta bantuan dan perlindungan sosial.

Fakta yang ada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kurangnya fasilitas yang memadai. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya mempunyai 1 Fasilitas untuk membina Anak Jalanan yaitu Loka Bina Karya (LBK) di Jalan Datuk Wan Abdul Rahman, dan masih bekerja sama dengan panti yang dimiliki oleh Provinsi, yang bernama Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai. Disanalah para anak jalanan dari umur 6-18 tahun dilatih, dididik, diberikan keterampilan, dan diajarkan mengenai sosial agama untuk merubah perilaku menjadi lebih baik oleh para tenaga profesional. Namun hal ini hanya berlangsung didalam panti selama 6 bulan. Dan anak jalanan yang berumur dibawah 15 tahun akan dikembalikan kepada orang tuanya.

Kota Pekanbaru berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru, jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2010 sebanyak 222 orang anak, kemudian tahun 2011 bertambah sebanyak 28 orang anak menjadi 250 orang anak, dan tahun 2012 bertambah 33 anak menjadi 283 orang anak. Cukup mengawatirkan karena setiap tahunnya jumlah anak jalanan terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu semua pihak harus dapat bekerja sama dalam melaksanakan perlindungan anak, salah satunya anak jalanan untuk mengurangi jumlah anak jalanan setiap tahunnya, biar bagaimanapun anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru yang harus diperhatikan hak-haknya dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lain yang seusianya.

Dengan melihat latar belakang belakang demikian penulis tertarik untuk dapat mengetahui kinerja dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai fungsi pemerintahan dalam membina anak jalanan yang berada di Kota Pekanbaru. Sehingga dari berbagai uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Pembinaan Anak Jalanan)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan diatas mengenai kinerja dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan kepada anak jalanan yang terdapat di Kota Pekanbaru, untuk mempermudah penelitian serta menginterpretasikan hasil dari penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan dijadikan arahan dan pedoman bagi penelitian. Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah kinerja dari Dinas Sosial dan Pemakaman sebagai Fungsi Pemerintahan dalam memberikan pembinaan anak Jalanan yang ada di Kota Pekanbaru ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

Untuk mengetahui fungsi pemerintahan dari kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap maraknya anak jalanan di lampu lalu lintas yang berada di jalan utama di Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

- **Kegunaan Teoritik**, berguna untuk pengembangan teori Ilmu Pemerintahan dan juga diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang kinerja Dinas Sosial sebagai fungsi pemerintahan dalam pembinaan yang dilakukan terhadap anak jalanan yang di Kota Pekanbaru. Serta bentuk sumbangan pemikiran bagi birokrasi pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan berbagai pihak-pihak yang terkait terhadap masalah anak jalanan yang bekerja di jalan.

- **Kegunaan Praktis**, dapat membantu para mahasiswa dan kalangan akademis lainnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan diatas, mengenai analisis kerja birokrasi dalam pengawasan pekerja anak, maka dalam tulisan ini akan digunakan teori yang ada relevansinya untuk mendukung dan menjawab pemecahan dari masalah dan fenomena yang ada.

a. Konsep Kinerja

Secara konseptual, pengkajian kinerja sebuah kelembagaan dapat dilakukan dengan pendekatan organisatoris, terutama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi. Dilihat dari segi inilah istilah kinerja dapat disejajarkan artinya dengan istilah *Performance* yang secara konseptual dapat diartikan sebagai pencapaian hasil atau "*The degree of accomplishment*" (Wasistiono, 2002 : 12)

Suprihanto (Srimulyo, 2001 : 33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Selain itu menurut Amstrong dan Baron kinerja disebut juga sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Wibowo, 2008 : 7)

Menurut Kumorotomo (Pasalong, 2010 : 180) menggunakan beberapa indikator kinerja yang dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain : Efisien, Efektifitas, Keadilan, dan Daya tanggap.

b. Fungsi Pemerintahan

Kehadiran negara atau pemerintah tetap ada dalam peraturan ekonomi rakyat, walaupun secara kuantitas atau kualitas memiliki variasi yang berbeda. Kehadiran tersebut, terutama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kebijakan perencanaan yang strategis.

Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi kelangsungan berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat (Rasyid, 2000 : 59).

Soewargono (1996 : 1) dan Djohan (1998 : 16) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintahan yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi penting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersebutuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum (Deri. S, 2014 : 18).

Menurut Devey (Rasyid, 2000 : 63) fungsi-fungsi pemerintahan regional dapat digolongkan dalam 5 pengelompokan, yaitu :

1. Fungsi penyediaan pelayanan, yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan;
2. Fungsi pengaturan, yakni perumusan dan penegakan peraturan-peraturan;
3. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi;
4. Fungsi perwakilan, untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal diluar bidang tanggung jawab eksekutif;

5. Fungsi koordinasi dan perencanaan, terutama dalam investasi dan tata guna tanah.

c. Konsep Anak Jalanan

Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain anak-anak tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaannya yang normal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Konsorsium anak jalanan Indonesia Supartono mengelompokkan anak jalanan kedalam 3 kelompok, yakni (Supartono, 2004 : 10-11)

1. Anak Perantauan (Mandiri). Anak jalanan pada kategori ini bukan merupakan penduduk asli daerah dan biasanya suka berpindah dari satu tempat ketempat lainnya. anak perantauan menjadikan jalanan sebagai tempat hidup dan bekerja.
2. Anak bekerja dijalan. Kategori ini meliputi anak yang masih memiliki hubungan dengan orang tua dan hanya menjadikan jalanan sebagai lahan bekerja. Terkadang anak jalanan yang bertipe ini masih duduk dibangku sekolah.
3. Anak jalanan asli. Kualifikasi anak jalanan asli antara lain adalah berasal dari keluarga gelandangan (yang hidup di jalanan dan terkadang tidak menetap) serta anak yang sengaja lepas dari ikatan orang tua dan bekerja apa saja di jalanan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan Departemen Sosial RI hanya menetapkan 2 kelompok anak jalanan, yakni (Supartono, 2004 : 11-12) :

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan dan menjadikan jalanan sebagai tempat tinggalnya. Kelompok ini identik dengan hidup mandiri yang memutuskan dan atau lama tidak bertemu dengan orang tua serta tidak mengenyam pendidikan formal.
2. Anak jalanan yang bekerja dijalan. Anak jalanan tipe ini hanya menghabiskan sebagian waktunya di jalanan untuk bekerja dan setelah selesai mereka akan pulang kembali ke rumah masing-masing dan tidak memiliki hubungan yang teratur dengan orang tuanya.

Tiga faktor yang menyebabkan timbulnya anak jalanan (Odi Shalahudin, 2004 : 72-75) :

1. Faktor Keluarga. (Keluarga Miskin, Perceraian dan Kehilangan Orang Tua, Kekerasan Keluarga, Keterbatasan Ruang dalam Rumah, Eksploitasi Ekonomi)
2. Faktor Lingkungan (Ikut-ikut teman, Bermalasan dengan Tetangga atau Komunitas, Ketidakpedulian atau Toleransi Lingkungan terhadap Keberadaan Anak di Jalanan)
3. Faktor Lain (Korban Penculikan, Dampak Program, Korban Bencana)

Anak jalanan tumbuh dari berbagai latar belakang sosial, seperti *Broken Home*, anak yatim yang terbuang, anak-anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, atau anak-anak yang harus membantu ekonomi orang tuanya maupun anak-anak yang lari dari problem keluarga maupun dilingkungan sekitarnya (repository.unhas.ac.id). Dan jumlah pekerja anak atau berusia dibawah 15 tahun di Indonesia cukup tinggi, laporan menunjukkan sebanyak 2,3 juta anak berusia 7-14 tahun merupakan pekerja anak dibawah umur. Mereka tidak dapat

menikmati hak-hal dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain dan rekreasi (edukasi.kompas.com).

E. Definisi Konseptual

Untuk menciptakan kesatuan pengertian, memudahkan penelitian dan penganalisaian, maka penulis akan menguraikan definisi konsep yang digunakan, yakni :

- 1) Kinerja Organisasi adalah efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhan secara efektif.
- 2) Birokrasi, adalah keseluruhan aparat pemerintah sipil ataupun militer yang melaksanakan atau membantu tugas pemerintahan dalam usaha pelaksanaan pemerintah.
- 3) Pembinaan, sebagai usaha untuk memberi pengarah dan bimbingan guna mencapai tujuan tertentu.
- 4) Anak jalanan, anak Laki-laki dan Perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup dijalan-jalan lampu lalu lintas.
- 5) Pembinaan yang dilakukan oleh birokrasi yang berwenang dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap anak jalanan, dilihat dari 5 hal dalam fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan, pengaturan, koordinasi dan perencanaan, perwakilan serta pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

yang bermaksud mencari data sebanyak-banyaknya untuk diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989: 143). Kemudian Penulis menguraikan secara deskriptif mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap anak jalanan. Metode deskriptif di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain lain), berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dipilihnya Dinas Sosial dan Pemakaman sebagai objek penelitian, karena Dinas Sosial dan Pemakaman bagian dari pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun diluar panti di Kota Pekanbaru.

b. Informan Penelitian

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Dalam menentukan informan penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar mengetahui informasi mengenai permasalahan penelitian. Adapun pada penelitian ini informan yang telah ditentukan yaitu sebanyak 8 orang, terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas, Kasi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Pegawai P2TP2A, Penjaga

LBK, masyarakat pengguna jalan, dan anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru.

c. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Anak Jalanan, dan Masyarakat. Hasil dari tanya jawab yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung analisis masalah yang diteliti, yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan, karya tulis para ahli, dan lain-lain untuk melengkapi data primer, yaitu antara lain :
 - Jumlah Penduduk/Rumah Tangga Miskin dan Berumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2012.
 - Anak yang Bekerja di Jalanan berdasarkan Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2010.
 - Jumlah Anak Jalanan Kota Pekanbaru menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2012.
 - Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
 - Serta data lain yang mendukung penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data seakurat mungkin melalui teknik sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan maupun tanya jawab secara terarah. Penelitian mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengaju sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data.

2. Teknik Observasi

Pengumpulan data dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara meneliti laporan-laporan, dokumentasi-dokumentasi, catatan, arsip serta berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang perolehan data secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

e. Teknik Analisa Data

Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder berhasil terkumpul, kemudian penulis menganalisa dengan teknik analisa data yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu mengenai kata-kata lisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam

situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman. H dan Purnomo, 2000 : 81).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Mengenai Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.

Keberadaan anak jalanan di Kota Pekanbaru menjadi salah satu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru khusus dinas terkait, yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman menjadi tangan pertama yang dimandatkan oleh Walikota untuk menangani masalah anak jalanan.

Menurut Ibu DR. Ir. Hj. Mutia Eliza, MM, sebagai Kepala Dinas Sosial yang baru dilantik pada April 2014, angkat bicara menjadi anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang menyenangkan, melaikan keterpaksaan yang harus mereka terima dan pasti ada sebabnya. Fenomena anak jalanan terutama di Kota Pekanbaru menuntut perhatian kita semua, bukan hanya dari instansi terkait saja, masyarakat turut andil didalamnya. karena penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikkan dengan pembuat onar, anak kumuh, suka mencuri, sampah masyarakat yang harus diasingkan.

Kemudian Bpk Roesli M. Noor, S.Sos sebagai Kasi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia, mengemukakan pendapatnya tentang keberadaan anak jalanan sangat meresahkan warga dan masyarakat, apalagi bagi pengguna jalan pada saat lampu merah. Anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru ini sebenarnya kebanyakan dari luar daerah bukan anak Pekanbaru asli saja, apalagi anak PUNK itu, kalau tidak kita perhatikan jika tidak

dikasih uang pas mengamen mereka mau membaret mobil dan bahkan mengucapkan kata kotor. Jelas sekali mereka meresahkan dan harus ditertibkan, tapi bukan berarti ditetibkan layaknya kriminalitas yang harus diadili.

B. Fungsi Penyediaan Pelayanan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap Pembinaan Anak Jalanan.

Pelayanan dalam pembinaan bertujuan agar tercapai, berikut Kasi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia Roesli M. Noor mengatakan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, secara konsep telah membuat rancangan pelayanan terhadap pembinaan anak jalanan. Namun kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, menjadi salah satu problematika yang harus dievaluasi. Bertujuan agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan dalam rangka pembinaan anak jalanan.

Sekretaris Dinas Sosial Seharuddin, S.sos, memberikan tanggapan mengenai pelayanan dalam pembinaan anak jalanan Dinsoskam melakukan pembinaan dengan memberikan pelatihan dan juga kursus singkat bagi anak jalanan yang dibina dalam panti. Kursus singkat yang diberikan kepada anak jalanan berupa, kursus baca tulis bagi anak jalanan usia dini, kemudian kursus menjahit, dan memasak bagi wanita, serta kursus otomotif mekanik bagi bagi pria.

Salah satu anak jalanan yang penulis jumpai dan melakukan tanya jawab pada saat anak tersebut menjual koran di Jalan Sudirman Bundaran Gubernur, Roni menuturkan bahwa pernah dirazia, namun hanya diperiksa dan didata di kantor Satpol-PP, terus orang tua dipanggil kemudian dilepas.

Salah seorang masyarakat pengguna jalan di Jalan Sudirman

mengenai fenomena anak jalanan, Lori memberikan tanggapan bahwa belum optimal dan maksimalnya dalam melakukan penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan. Seharusnya pemerintah lebih sigap karena hal ini mulai meresahkan bagi pengguna jalan. Dan diharapkan pemerintah untuk lebih serius menangani permasalahan ini dengan berbagai upaya yang ada harus lebih diimplementasikan pelaksanaannya. Pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan pihak terkait, namun juga harus bekerjasama dengan masyarakat serta mengajak untuk tidak membiasakan memberikan mereka uang kepada anak jalanan. Agar mereka jera dijalan karena tidak menghasilkan uang lagi.

C. Fungsi Pengaturan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap Pembinaan Anak Jalanan.

Semakin hari semakin banyak anak jalanan yang berkeliaran di Kota Pekanbaru menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat, peraturan manakah yang telah dibuat dan dijalankan pemerintah untuk terus menekan lajunya jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Peraturan tentang anak jalanan menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Ibu DR. Ir. Hj. Mutia Riza, MM :Peraturan yang mengatur tentang anak jalanan sudah dijelaskan dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, didalam telah dijelaskan segala hal tentang anak jalanan. Karena anak jalanan telah mengganggu ketertiban sosial didalamnya dan telah ditetapkan berdasarkan sanksinya.

Ada beberapa hal upaya-upaya yang sedang dijalankan maupun akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk anak jalanan maupun kepada masyarakat, demi terwujudnya pembinaan anak jalanan yang berkualitas dan ketertiban sosial. Upaya

yang sedang dijalankan sudah ada, kami juga memplanningkan untuk kedepannya agar lebih baik lagi, seperti :

- Dalam pembinaan anak jalanan, Dinas Sosial dan Pemakaman memberikan pelayanan, pelatihan, pendidikan, pelayanan kesehatan, konsultasi sampai dengan terapan psikologi,
- Untuk mengurangi populasi anak jalanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, kedepannya juga menerapkan sanksi denda maupun kurungan kepada para masyarakat yang memberikan berupa uang kepada anak jalanan,
- Kemudian Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, merancang wacana untuk membuat call center pengaduan permasalahan anak jalan, dan lain-lain,
- Dinas Sosial dan Pemakaman juga akan membuat rekaman suara yang akan diputarakan disetiap persimpangan lampu lalu lintas, tentang adanya larangan pemberian bagi anak jalanan dan gepeng beserta sanksinya. Seperti himbuan polisi disimpang SKA yang ada saat ini.

Dari pemaparan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tersebut, dapat kita lihat sudah adanya aturan yang jelas serta upaya yang sedang dan akan dijalankan untuk menangani anak jalanan. Namun dari fakta yang dijumpai implementasi dari Perda tersebut, jauh dari apa yang kita harapkan bersama dan minimnya SDM menjadi salah satu kendala dalam hal menertibkan dan membina anak jalanan, dimana Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kekurangan SDM. Jadi membuat aturan yang telah diciptakan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

D. Fungsi Koordinasi dan Perencanaan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap Pembinaan Anak Jalanan.

Dalam membina anak jalanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terus berupaya agar mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar mendapatkan hasil yang optimal.

Untuk melakukan pembinaan membentuk team dari Dinsoskam berkoordinasi dengan pihak lain. Seperti Balai Latihan Kerja dan LSM peduli anak. Untuk menrazia anak jalanan kita bekoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Polri, dan Satpol-PP Kota Pekanbaru, yang dilakukan tiga minggu sekali

Namun, tiga minggu sekali nampaknya bukan waktu yang optimal, perlu penambahan frekwensi. Setelah melakukan razia kita lihat besok-besoknya, anak jalanan tetap muncul dijalanan, sebenarnya hal apa yang menjadi masalah.

Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Ibu DR. Ir. Hj. Mutia Riza, MM mengatakan hal yang membuat kurang optimalnya pembinaan anak jalanan adalah terkadang bocornya razia anak jalanan, sehingga ketika razia hanya sedikit yang berhasil kita amankan. Dan juga minimnya anggaran membuat kendala dalam melaksanakan pembinaan.

Pernyataan diatas menunjukan hal yang menjadi kendala adalah sumber dana dari APBD yang dirasakan belum cukup. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terus bekoordinasi terkait anak jalanan keberbagai pihak. Salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), namun sebenarnya ada satu lagi lembaga yang sekarang sudah dibubarkan yaitu KPAID Kota Pekanbaru. Tapi disayangkan

lembaga ini SK-nya tidak diperpanjang oleh Walikota Pekanbaru.

Dalam melakukan pembinaan anak jalanan, sebenarnya secara Peraturan Perundang-undangan memang menjadi kewajiban Pemerintah, namun ceraca moral dan etika masyarakat juga berperan penting didalamnya. Sehingga apa yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak sia-sia.

Lembaga yang saat ini membantu mengatasi persoalan anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), masalah dalam pembinaan anak bahwa kerjasama dan koordinasii Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan instansi lain cukup baik. Dinas Sosial dan Pemakaman sebagai lembaga teknis berkoordinasi dengan P2TP2A sebagai mediator, dengan koordinasi yang baik. Maka pelaksanaan perlindungan anak dapat diupayakan semaksimal mungkin, namun tetap faktor anggaran menjadi salah satu kendala.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau. Dimana Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai Panti Sosial Bina Remaja yang terletak di Kecamatan Rumbai. Ada 3 tiga sistem pembinaan :

1. Pembinaan Panti, dilakukan bagi anak jalanan yang terjaring razia. Bagi yang kemauannya mau ikut prosedur kami bina, maka kami akan mengirim anak-anak yang terjaring razia untuk dibina didalam PEBR selama kurang lebih enam bulan. Dengan memberi materi bimbingan sosial, mental spiritual, maupun pelatihan yang diminati oleh anak tersebut.
2. Pembinaan diluar panti, pembinaan ini dilakukan bagi anak yang tidak mau dimasukan di PSBR, dengan cara memberikan pelatihan

keterampilan, seperti bengkel sepeda motor, sablon dan lain-lainnya.

3. Pemulangan kedaerah asal, bagi anak jalanan yang berasal dari luar Provinsi Riau..

E. Fungsi Perwakilan dari Anggota DPRD Komisi III Kota Pekanbaru terhadap Pembinaan Anak Jalanan

Anggota Dewan sebagai penyambung lidah rakyat, yang sangat berperan dalam pembinaan anak jalanan dan mengatasi masalah-masalah anak lainnya. Untuk itu penulis mewawancarai salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru periode 2009-2014, Ibu Ade Hartati Rahmat, Mpd sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru yang sangat sering mengeluarkan *Statement* tentang anak jalanan dan masalah sosial lainnya.

Ibu Ade Hartati Rahmat, Mpd, menanggapi sikap serta kebijakan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam persoalan anak jalanan harus adanya penanggapan yang terintegrasi dan berkelanjutan oleh Pemko Pekanbaru, Dinas yang berkaitan saling berkoordinasi. Dinas yang berkaitan dalam hal pembangunan sumber daya manusia (Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan), hal ini sebagai bentuk salah satu cara menangani banyaknya anak jalanan. Apabila semakin banak anak jalanan, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya generasi penerus bangsa yang mampu mengatasi masalah kedepannya.

Menurut Ibu Ade Hartati, Mpd menanggapi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 ini tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan tidak adanya komitmen dan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun seluruh komitmen dari Pemko Pekanbaru maupun seluruh komponen masyarakat. Pemerintah dan masyarakat menjadi kata kunci dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah ini. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, merupakan bidang pemerintah yang mengurus masalah penertiban dan pembinaan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 (Bab V Pasal 8 ayat 4).

Tindak lanjut dari razia dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis, baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota.

Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk mengatasi masalah anak jalanan ini. Karena tidak akan ada gunanya apabila hanya ada satu pihak yang berusaha dalam mengatasi masalah anak jalanan.

DPRD Kota Pekanbaru telah membantu *mensupport* permasalahan pendanaan dengan mengesahkan anggaran untuk pembinaan anak jalanan, itu terbukti dengan dibangunnya rumah singgah dan panti sosial melalui APBD perubaham Kota Pekanbaru tahun 2014 dan APBD Kota Pekanbaru tahun 2015.

F. Fungsi Pembangunan Sebagai Fasilitas dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap Pembinaan Anak Jalanan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru, dirasakan sangat perlu nya tempat atau wadah anak jalanan. Sebagai tempat untuk pengembangan potensi diri dan berkumpul untuk lalu diberikan arahan.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Ibu DR. Ir. Hl. Mutia Riza, MM, Fasilitas yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memang saat ini sangat

minim. Namun pada APBD 2014 Dinas Sosial dan Pemakaman merencanakan untuk membangun Rumah singgah bagi anak jalanan. Dan di tahun 2015 Dinas Sosial dan Pemakaman telah menganggarkan pembangunan panti sosial. Sekarang hanya mempunyai Loka Bina Karja saja.

Bahkan dalam pidato Walikota Pekanbaru Firdaus ST. MT, pada hari jadi Kota Pekanbaru ke-230, mengatakan : Jumlah belanja yang dialokasikan untuk bidang sosial sebesar Rp. 1.207.109.025,- yang digunakan untuk berbagai program sosial yang antara lain didalamnya terdapat program pembinaan kesejahteraan sosial anak terlantar dan anak jalanan (www.Pekanbaru.go.id).

Pembangunan Rumah Singgah dan Panti Sosial merupakan hal yang positif yang harus didukung semua pihak, namun apakah setelah proses pembangunan selesai fasilitas itu dapat dioptimalkan. Untuk itu penulis menelusuri salah satu aset Pemerintah Kota Pekanbaru yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang digunakan untuk membina anak jalanan, yaitu Loka Bina Karya (LBK) yang beralamat di Jalan Datuk Wan Abdul Rahman, Pekanbaru. Fakta yang penulis temui dilapangan, tampak gedung LBK yang cukup luas namun dengan kondisi yang kurang terawat. Yang sepertinya menjadi masalah klasik di pemerintahan kita, apa yang telah dibangun tidak mampu dioptimalkan secara baik. Seharusnya dengan fasilitas LBK yang ada cukup memadai, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat mengoptimalkan. Sekiranya nanti setelah dioptimalkan daya tapung tidak tercukupi barulah membuat fasilitas lagi, sehingga anggaran yang ada untuk pembangunan dapat dioptimalkan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia.

Ditemukan kembali keganjalan, tidak adanya pembuatan data base yang jelas dan membuktikan sistem administrasi yang kurang baik. Ketika penulis bertanya ke dinas sosial dan pemakaman melalui Kasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak Bapak Roesli M.Noor Penulis juga tidak mendapatkan jawaban yang kongkrit namun Penulis disodorkan data seadanya.

KESIMPULAN

- a) Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, ditinjau dari aspek pelayanannya secara konseptual sudah berjalan bagus, karena secara konsep pelayanan yang diberikan kepada anak-jalanan yang akan dibina di dinas sosial dan pemakaman telah dirumuskan dengan bagus, baik itu bagi anak jalanan yang akan dibina di Loka Bina Karya (LBK) milik Pemerintah Kota Pekanbaru maupun anak jalanan yang akan di bina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai milik Pemerintah Provinsi Riau, dimana Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terus mengiringi jalannya pembinaan tersebut. Meski diletakkan di PSBR yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Provinsi Riau, namun Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tetap ikut berperan didalamnya.
- b) Masalah tentang Anak Jalanan ditinjau dari Aspek Pengaturannya sudah ada peraturan daerah yang mengatur yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Namun Pemerintah Kota Pekanbaru belum mempunyai Peraturan Daerah khusus yang mengatur anak jalanan.
- c) Ditinjau dari Koordinasi dan Perencanaan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru selaku

- Lembaga teknis yang melakukan Pembinaan terhadap anak jalanan, koordinasi yang dilakukan sudah baik ini terbukti diadakannya razia rutin 1 kali dalam 3 minggu bersama Satpol PP, Kepolisian, LSM yang berkaitan dengan anak, P2PT2A dan seluruh unsur yang terkait. Koordinasi dengan Lembaga Eksekutif dalam hal ini DPRD Kota Pekanbaru juga terlihat baik melalui anggaran pembangunan.
- d) Ditinjau dari Fungsi Perwakilan dalam Hal ini DPRD Kota Pekanbaru, sudah ada sinergi yang baik dengan pemerintah dengan dibuktikan dengan di setujuinya anggaran Pembangunan Rumah Singgah melalui APBD Perubahan tahun 2014, dan dan Panti Sosial melalui anggaran APBD tahun 2015.
- e) Ditinjau dari fungsi Pembangunannya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru saat ini hanya memiliki 1 Fasilitas Pembinaan yaitu Loka Bina Karya (LBK), namun saat penulis berkunjung ke LBK tampak bangunan tersebut kurang terawat dan tidak ada aktivitas disana.

Saran

- a) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru harus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Harus ada penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan, karena semakin banyak anak jalanan dikhawatirkan akan menghambat lajunya pertumbuhan kota dan semakin banyak anak-anak yang menjadi anak jalanan dikhawatirkan hilangnya generasi penerus bangsa yang siap bersaing kedepannya.
- b) Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini harus lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menegakkan Aturan yang telah dibuat dalam hal ini Perda Nomor 12 Tahun 2008, karena Perda ini dirasa kurang optimal.

- c) Kepada seluruh komponen masyarakat untuk membantu Pemerintah menyelesaikan masalah anak jalanan ini. Diperlukan kerjasama dan komitmen bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat karena ini adalah masalah kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusri, dkk, *“Politik, Birokrasi Perubahan Sosial”*, Fisip UR, Pekanbaru, 2013.
- Abdul Rachmad, *“Hukum Pekerja Anak”*, Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, 2008.
- Bagong, Suyanto, dkk, *“Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”*, Jakarta, Kencana, 2005.
- George, D. Hasley, *“Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda”*, Rieka Cipta, Jakarta, 2003.
- George. G, Terry, *“Pengembangan Sumber Daya Manusia”*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Odi Shalahudin, *“Suatu Bayang-Bayang Ancaman”*, Yayasan Setara, Semarang, 2004
- Pasolong Harbani, *“Teori Administrasi Publik”*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Supartono, *“Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan”*, Yayasan Setara, Semarang, 2004.
- Usmain, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000.
- Wasistiono. Sado, *“Penilaian Kinerja Organisasi”*, PT. Ghalian Indonesia Jakarta, 2002.
- Wibowo, *“Manajemen Kinerja”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ryaas Rasyid, dkk, *Otonomi Daerah : Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Prlajar, Bandung, 2000.
- Sumber Lain :**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tentang Ketertiban Sosial.

Media Online :

Academia.edu

Wikipedia.com

www.Pekanbaru.go.id.

ykai.net